

PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

No. 127 | Tahun XXXIV | Maret-April 2017



Vera Eve Lim:
Momentum
Melakukan
Perbaikan

Bank Bakal
Dibebani
Pungutan Baru

Menimbang
Manfaat dan
Risiko Blockchain

**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANA

Achmad Friscantono

SIRKULASI

Wara Sri Indriani
Adrian Burhan

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN**Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/
STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Blockchain, Sebuah Keniscayaan?



Inovasi disruptif (*disruptive innovation*) terus berlangsung sebagai dampak dari kemajuan dan perkembangan teknologi. Selalu ada yang baru untuk menggantikan yang lama. Begitu pun di industri perbankan.

Teknologi perbankan terus berkembang. Belakangan ini muncul teknologi yang bernama *blockchain*. Teknologi ini dinilai bakal mengubah proses bisnis perbankan. Jika sebelumnya setiap

pencatatan transaksi hanya dikelola dan tercatat di satu bank, dengan teknologi *blockchain*, pencatatan setiap transaksi di-*publish* di semua jaringan internet dan bisa diakses publik. Ketika transaksi sudah dicatat di dalam buku besar global itu (jaringan teknologi *blockchain*), sangat mustahil bagi siapa pun untuk menghapus catatan transaksi tersebut.

Transaksi dengan menggunakan teknologi *blockchain* bersifat *peer to peer*. Jadi, sebuah data (bisa berupa pesan, uang, atau informasi penting) dapat dipindahkan dari satu pengguna ke pengguna lain tanpa bantuan pihak ketiga untuk memprosesnya. Dengan *blockchain*, kita tidak perlu lagi bergantung pada satu server karena seluruh transaksi terduplikasi ke seluruh jaringan sehingga terhindar dari berbagai bentuk penipuan akibat data yang dimodifikasi, *server down*, atau akun yang diretas.

Tak hanya itu, teknologi *blockchain* juga bisa diterapkan pada sebuah pemerintahan. Jika sebuah pemerintahan menggunakan teknologi *blockchain* untuk mencatat segala macam bentuk perjanjian atau transaksi, mustahil bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Tidak ada satu pun komputer yang mampu mengubah transaksi yang sudah tercatat di dalam *blockchain* sehingga “*smart contracts*” yang menggunakan teknologi ini dapat menunjukkan secara tepat dan detail ke mana saja uang mengalir. Semua transaksi dan catatan keuangan dari lembaga pemerintahan akan tercatat secara otomatis.

Sejatinya, teknologi *blockchain* telah dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Beberapa perusahaan teknologi pun tengah menguji coba penerapan teknologi ini. Salah satunya, Hitachi. Beberapa perusahaan keuangan global bahkan ada yang mulai menerapkannya, antara lain Citibank dan HSBC. Visa yang dikenal sebagai perusahaan sistem pembayaran (*remittance*) terbesar di dunia pun saat ini sedang menguji coba teknologi *blockchain*.

Beberapa pakar digital menilai, teknologi *blockchain* memiliki potensi yang sangat besar pada masa mendatang. Teknologi ini patut dikembangkan di Indonesia untuk memberantas korupsi. Misalnya, membuat *e-budgeting* dengan teknologi *blockchain*.

Teknologi *blockchain* memiliki kelebihan tersendiri. Di antaranya, lebih efisien karena bisa menekan biaya transaksi, transparan karena dapat diakses publik, tingkat keamanannya tinggi, serta mampu meminimalkan kasus *human error* karena semua transaksi dikomputerisasi dan tercatat secara otomatis.

Kendati demikian, untuk penerapannya secara masif di industri perbankan, termasuk di negeri ini, harus dilakukan berbagai uji coba dan kajian yang mendalam mengenai manfaat dan risikonya. Rangkaian uji coba dan penerapan di beberapa perusahaan global bisa menjadi tolok ukur. Selain kesiapan teknologi dan bisnis, regulasinya harus disiapkan, baik untuk memajukan industri maupun melindungi nasabah. ■

Dari Redaksi 1

Perbanas Utama

Menimbang Manfaat dan Risiko Blockchain 3
Berbagai terobosan dan inovasi teknologi terus dilakukan dalam rangka memajukan industri keuangan. Teknologi terbaru bernama *blockchain* mengusung efisiensi, efektivitas, dan transparansi.



Blockchain yang Menyita Perhatian 6

Butuh Waktu dan Kajian Mendalam 8
Teknologi perbankan terus berkembang, salah satunya adalah *blockchain* yang diyakini akan ikut mengembangkan industri perbankan. Namun, penerapannya membutuhkan waktu dan kajian yang mendalam.

Perlu Pertimbangan dan Tahapan 10

Profil

Vera Eve Lim
Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Momentum Melakukan Perbaikan 11
Lambatnya pertumbuhan ekonomi tidak menjadi halangan bagi industri perbankan untuk terus berkembang. Justru, ini merupakan momentum bagi para pelaku industri untuk terus melakukan perbaikan.



Aktualita

Gairah Perbankan Negeri Ginseng 14
Iklim perbankan Indonesia dan Korea Selatan yang tidak jauh berbeda memudahkan bagi kedua negara untuk melakukan kerja sama di sektor perbankan. Sudah ada beberapa bank asal Korea Selatan yang masuk ke Indonesia. Sebaliknya, Korea Selatan pun memberikan peluang kepada perbankan Indonesia untuk membuka cabang di sana.

Rekening yang Dijamin LPS Meningkat 16
Jumlah rekening yang dijamin LPS pada posisi Februari 2017 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Simpanan dengan nilai saldo Rp2 miliar jumlah rekeningnya meningkat 1,64% ketimbang Januari 2017.



Mencegah Fraud Bilyet Berlanjut 18
Regulasi yang ketat di industri perbankan ternyata tak menyurutkan niat para pelaku *fraud* untuk berbuat kecurangan. Belakangan ini muncul satu kasus *fraud* pada bilyet deposito.

Kinerja


Ada Geliat Pertumbuhan Kredit 20
Kondisi ekonomi global yang relatif lebih baik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Penyaluran kredit perbankan sepanjang triwulan pertama tahun ini membaik.

Wacana

Bank Bakal Dibebani Pungutan Baru 22
Jika sebelumnya industri perbankan nasional mesti membayar premi kepada OJK dan program penjaminan simpanan di LPS, ke depan industri ini juga harus membayar premi program restrukturisasi. Meski bertujuan baik, pungutan premi ini masih jadi polemik.

Sekilas Berita

Kerja Sama IKPIA Perbanas dengan KFB 24



Menimbang Manfaat dan Risiko Blockchain

Berbagai terobosan dan inovasi teknologi terus dilakukan dalam rangka memajukan industri keuangan. Teknologi terbaru bernama *blockchain* mengusung efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Kemajuan teknologi akan mendorong perubahan, baik individu manusia maupun sebuah entitas bisnis dan industri, termasuk industri perbankan. Salah satu teknologi yang dinilai akan membawa perubahan pesat ialah *blockchain*.

Dengan teknologi yang diterapkan saat ini, bank mencatat semua transaksi finansial yang mereka lakukan di dalam sebuah “buku besar” atau *ledger*. Berpuluh-puluh tahun yang lalu buku besar ini mungkin berbentuk ratusan buku tua yang sudah berdebu. Setiap kalimat baru yang muncul di dalam buku besar merupakan catatan transaksi yang baru terjadi. Catatan-catatan ini sekarang sudah didigitalkan, tapi buku besar tersebut masih dimiliki dan dikontrol oleh suatu bank.

Sementara itu, *blockchain* itu unik karena buku besar tersebut tidak dikelola oleh satu bank atau pihak tertentu. Sebaliknya, catatan buku besar ini disebarluaskan secara publik dan dikelola oleh ribuan komputer di dunia dalam waktu yang bersamaan. Anda dapat melihat seluruh catatan transaksinya langsung pada sistem ini.

"Nah, buku besar yang dapat diakses dan dikelola oleh publik ini adalah kekuatan utama *blockchain*. Setiap komputer yang terdapat di dalam jaringan dapat membuat catatan baru tentang transaksi yang baru terjadi," jelas Oscar Darmawan, direktur utama dari Bitcoin Indonesia. Ketika transaksi sudah dicatat di dalam buku besar global ini, sangat mustahil bagi siapa pun untuk menghapus catatan transaksi tersebut.

Blockchain membuat transaksi pembayaran dapat terjadi dan tercatat tanpa menggunakan buku besar yang dikelola oleh sebuah bank. Awalnya, hal ini memang penting bagi *bitcoin* (mata uang pertama yang beredar menggunakan teknologi tersebut) saja. Namun, kini teknologi buku besar tersebut mulai dapat digunakan dan diaplikasikan untuk apa pun.

Selain itu, teknologi tersebut sejatinya bisa diterapkan pada sebuah pemerintahan. Jika sebuah pemerintahan menggunakan teknologi *blockchain* untuk mencatat segala macam bentuk perjanjian atau transaksi, akan menjadi mustahil bagi seseorang untuk melakukan aksi korupsi. Tidak ada komputer satu pun yang mampu mengubah transaksi yang sudah tercatat di dalam *blockchain* sehingga “smart contracts” yang menggunakan teknologi ini dapat menunjukkan secara tepat dan detail ke mana uang mereka mengalir—yang akan menjadi suatu bentuk akuntabilitas yang jauh lebih baik daripada yang ada sekarang. Sebuah perusahaan tidak akan dapat memalsukan rekeningnya. Semua transaksi pengiriman uang dari lembaga pemerintahan akan tercatat.

Perdebatan tentang bagaimana pemerintah dapat menggunakan dan beradaptasi dengan sistem pembayaran baru ini memang baru dimulai. Untuk saat ini belum ada pemerintah yang muncul untuk meregulasi *blockchain*, walaupun sudah ada beberapa negara yang melarang mata uang digital itu untuk beredar di negara mereka. Namun, dengan satu klik saja, *blockchain* dapat mengubah bagaimana cara pemerintah melakukan bisnis dengan dirinya sendiri ataupun dengan pihak lain.

Ramai-Ramai Menerapkan Blockchain

Beberapa perusahaan teknologi dan keuangan global tengah melakukan pengembangan teknologi terkini bernama *blockchain*. Perusahaan-perusahaan tersebut tengah menguji coba penerapan *blockchain*, seperti Hitachi, Citibank, dan HSBC. Beberapa waktu lalu perusahaan teknologi raksasa Jepang, Hitachi, bersiap meluncurkan terobosan terbaru dalam dunia bisnis dan finansial. Perusahaan ini dikabarkan akan membangun Financial Innovation Laboratory di Silicon Valley. Inovasi besar yang akan diciptakan bernama Teknologi *Blockchain* yang merupakan basis dari teknologi mata uang digital.

Menurut pakar digital Marketing Indonesia, Anthony Leong, potensi teknologi *blockchain* sangat besar. Teknologi ini patut dikembangkan di Indonesia dalam hal memberantas korupsi, seperti membuat *e-budgeting* dengan teknologi *blockchain*. “Teknologi *blockchain* punya kelebihan tersendiri, di antaranya lebih efisien karena bisa menekan biaya transaksi, transparan karena dapat diakses publik, keamanannya tinggi, serta mampu meminimalisasi

kasus *human error* karena semua transaksi nantinya telah dikomputerisasi dan tercatat secara otomatis,” jelasnya.

Anthony menambahkan, bank ternama semacam Citibank, HSBC, dan bank ternama lain di luar negeri sudah mengaplikasikan teknologi *blockchain* pada sistem perbankannya. Tak hanya itu, Visa yang dikenal sebagai perusahaan sistem pembayaran (*remittance*) terbesar di dunia saat ini juga sedang menguji teknologi tersebut.

“*Blockchain* terbukti dapat diaplikasikan di sektor teknologi dan finansial. Namun, teknologi ini juga bisa digunakan untuk berbagai bidang lainnya. Bahkan, beberapa perusahaan ternama dan pemerintahan lainnya rela mengeluarkan dana besar untuk mengembangkan *blockchain*, seperti Netscape, operator bursa saham Nasdaq, bank sentral (Eropa dan Tiongkok), pemerintah Honduras, dan akhir-akhir ini Perdana Menteri Singapura juga sudah memberi perintah untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknologi ini,” tegas Anthony yang juga Sekjen Asosiasi Pengusaha Digital Indonesia (APDI).

Selain itu, Anthony menyoroti manfaat menarik lainnya yang dapat

diperoleh jika menggunakan teknologi ini, dari membuat *e-budgeting* sampai dengan membuat pemilihan umum (pemilu) menjadi lebih transparan, dan *smart contracts*. “Bisa jadi kita tidak akan perlu lagi adanya pihak ketiga untuk menjadi saksi transaksi perpindahan dana dan dokumen lainnya,” tambah dia.

Jika *e-budgeting* sudah dibuat di *database blockchain*, hal itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi oleh siapa pun. Ini bisa menjadi alternatif kalau solusi untuk pemilu. “Nantinya bisa menjadi solusi yang baik ke depannya tanpa membuang biaya yang besar,” ujarnya.

Kendati demikian, dia melihat teknologi ini memang belum tentu dapat terealisasi dalam waktu dekat, dibutuhkan waktu lama. Akan tetapi, sudah ada begitu banyak perusahaan global ternama yang terlibat dalam proyek pengembangan teknologi *blockchain*. Teknologi demikian, menurut Anthony, akan memasuki aspek kehidupan manusia suatu saat.

“Dibutuhkan waktu lebih dari 30 tahun bagi internet untuk berkembang luas ke seluruh dunia, delapan tahun sudah *blockchain* terbentuk. Kita lihat saja 5-10 tahun lagi, *blockchain* akan masuk ke dalam setiap aspek kehidupan kita semua seperti kita memakai *smartphone*,” pungkasnya.

Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), IBM Corp, juga tengah mengembangkan teknologi *blockchain* yang dinilai akan sangat membantu industri perbankan meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi. Hal tersebut diungkapkan Iqbal F. Alikhan, *Strategy and Business Dev. Executive* IBM Global Payments Industry & Blockchain, dalam sebuah seminar, beberapa waktu lalu.

Dalam presentasinya, Iqbal mengidentifikasi *blockchain* sebagai metode yang hemat biaya dalam bertransaksi. IBM

Beberapa perusahaan teknologi dan keuangan global tengah melakukan pengembangan teknologi terkini bernama blockchain. Perusahaan-perusahaan tersebut tengah menguji coba penerapan blockchain, seperti Hitachi, Citibank, dan HSBC.

yang bermarkas di New York ini juga melihat *blockchain* sebagai alternatif untuk digunakan sebagai *password* sekali pakai pada masa depan. *Blockchain* merupakan sebuah *ledger* (buku dalam akuntansi) yang terdistribusi, terdiri atas seluruh transaksi dari awal hingga terbaru dalam urutan waktu. Transaksi-transaksi tersebut tidak dapat diduplikasi dan tidak perlu diidentifikasi oleh pihak otoritas tertentu, tapi dilakukan oleh sistem terdistribusi yang disebut *node*.

Blockchain pun menjadi generasi baru dalam bertransaksi yang menunjukkan kepercayaan, akuntabilitas dan transparansi saat menjalankan proses bisnis. Dengan tren perbankan yang mengarah ke ranah *mobile banking*, dengan teknologi yang makin canggih memicu permasalahan tersendiri. Misalnya saja, terdapat banyak ancaman keamanan dalam teknologi *mobile*, misalnya *Wi-Fi* yang tidak aman dan *malware* yang terpasang di dalam

***Blockchain* pun menjadi generasi baru dalam bertransaksi yang menunjukkan kepercayaan, akuntabilitas dan transparansi saat menjalankan proses bisnis.**

ponsel yang mencuri *password* sekali pakai. Oleh karena itu, untuk pembayaran *peer-to-peer*, IBM melihat *blockchain* dapat menjadi solusi.

Tentu saja penerapan teknologi ini pada industri perbankan nasional harus melalui kajian yang mendalam. Selain menimbang manfaatnya, tentu harus menghitung risikonya. Selain itu, harus diiringi dengan regulasi yang tepat. Sehingga, penerapan yang dilakukan bisa memberikan manfaat dan perlindungan yang maksimal, baik bagi industri, nasabah, maupun bangsa. ■



Keunggulan Blockchain

1. Teknologi Peer-to-Peer

Transaksi menggunakan teknologi *blockchain* bersifat *peer-to-peer*, dalam arti sebuah data (dapat berupa pesan, uang, atau informasi penting) dapat dipindahkan dari satu pengguna ke pengguna yang lain tanpa bantuan pihak ketiga untuk memprosesnya. Dengan *blockchain*, kita tidak perlu lagi bergantung pada satu server karena seluruh transaksi terduplikasi ke seluruh jaringan sehingga terhindar dari berbagai bentuk penipuan karena data yang dimodifikasi, *server down*, atau akun yang diretas.

2. Smart Contracts

Blockchain menawarkan kesempatan untuk memasukkan segala bentuk perjanjian bisnis, ijazah pendidikan, akta tanah, kelahiran, pernikahan, atau dokumen-dokumen penting ke dalam *database blockchain* yang sangat mustahil untuk diretas maupun dipalsukan. Seluruh sistem berjalan tanpa pihak ketiga

dan terjadi otomatis berdasarkan algoritma. *Blockchain*, dengan *database* yang terpecah dalam ratusan juta server, akan memastikan bahwa perjanjian secara otomatis akan tereksekusi, terdata, dan tersimpan dalam sistem yang transparan sehingga dapat dicek kebenarannya.

3. Instan, Aman, Efisien, dan Transparan

Pengiriman data terjadi secara instan dan efisien. Semua transaksi dan penyimpanan data terjamin keamanannya karena terduplikasi di seluruh jaringan *blockchain* sehingga untuk mengubah satu data si peretas juga harus mengubah data yang sama di semua komputer pengguna yang lain di saat yang sama. Hal ini sangat tidak mungkin untuk dilakukan. *Blockchain* bersifat seperti sebuah buku besar, dalam hal ini semua transaksi bersifat transparan dan bisa dicek oleh semua orang sehingga memastikan kredibilitasnya.

Blockchain yang Menyita Perhatian

Teknologi mendorong kemajuan industri, termasuk perbankan. Kini tengah berkembang teknologi baru yang bisa diterapkan industri perbankan ke depan, yakni *blockchain*.

Tidak ingin tertinggal dengan negara maju, perbankan Indonesia mulai melirik teknologi *blockchain* sebagai salah satu sistem untuk mendorong kemajuan yang pesat. Meski masih tergolong baru, *blockchain* banyak menyita perhatian para pelaku industri karena lebih efektif dan efisien untuk setiap proses yang ada di industri perbankan.

Blockchain diyakini akan mampu mengubah industri keuangan global. World Economic Forum baru-baru ini menjelaskan bahwa *blockchain* merupakan salah satu dari 10 teknologi paling inovatif sepanjang 2016.

Sifat *blockchain* yang terbuka dan transparan mampu menyederhanakan cara individu serta organisasi dalam bertransaksi menjadi tanpa sekat dan batas sehingga mendukung mobilitas pengguna. Teknologi ini sangat tepat bagi industri keuangan dan perbankan, termasuk *financial technology (fintech)*, yang melibatkan banyak pihak dan selama ini masih memerlukan kertas manual.

Setiap dokumen yang masuk ke dalam sistem *blockchain* akan mudah ditemukan sehingga mampu mempersingkat waktu transaksi. Selain itu, tidak akan ada lagi dokumen ganda yang ada di dalam sistem.



Oscar Darmawan, *Chief Executive Officer (CEO)* Blockchain Indonesia, mengatakan, penerapan teknologi ini di industri perbankan sebenarnya tidak banyak mengubah proses yang selama ini sudah terjadi. Terutama jika dilihat dari sudut pandang *end user*, perbedaan sistem yang digunakan tidak akan terlihat sama sekali.

“Pada saat *blockchain* diterapkan untuk perbankan sebenarnya *end user* tidak melihat perbedaannya. Bukan berarti *end user* harus memahami *blockchain*. Teknologi ini adanya di *back end* untuk membantu proses perbankan menjadi lebih efisien dan efektif. *End user* akan sama saja seperti biasa. Tidak ada bedanya,” jelasnya kepada *Probank*.

Menurut Oscar, penerapan *blockchain* di perbankan selain dapat meningkatkan kecepatan sistem, biaya yang dikeluarkan perbankan akan banyak berkurang. Penghematan biaya ini

akan banyak terjadi dari sisi penggunaan kertas yang biasa dipakai sebagai kelengkapan administrasi.

Setiap dokumen yang masuk ke dalam sistem *blockchain* akan mudah ditemukan sehingga mampu mempersingkat waktu transaksi. Selain itu, tidak akan ada lagi dokumen ganda yang ada di dalam sistem. Hal ini akan mampu mengurangi *fraud* yang diakibatkan oleh dokumen yang tumpang tindih.

“Ini juga akan mengurangi penggunaan dokumen secara berlebihan dan mengurangi banyak pihak yang terlibat. Karena makin banyak pihak ikut terlibat, maka akan ada *human error*. Inilah fungsinya *blockchain*, mengantisipasi *human error* tersebut. *Blockchain* ini juga tidak akan berhenti pada tahun ini atau tahun depan sebagai *hot topic*,” kata Oscar.

Kendati demikian, harus ditingkatkan keamanan yang ada di dalam *blockchain*. Menurut Oscar, sistem keamanan yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan industri perbankan.

Hal senada juga dikatakan Achmad Fakhruddin, *Division Head Electronic Channel Solutions* Multipolar. Dengan adanya *blockchain*, tidak akan ada lagi data atau uang yang bisa dicuri. Ini disebabkan oleh menyebarnya informasi dengan baik dan integrasi yang baik yang ada di dalam *blockchain*.

“Ini juga sangat aman dan sangat cepat untuk melakukan transaksi antara satu lembaga atau negara dan lembaga atau negara lainnya,” katanya.

Antusiasme pelaku industri sendiri, khususnya industri keuangan, menurut Achmad, sangat tinggi terhadap *blockchain* ini. Memang masih ada beberapa hal yang masih belum bisa diterima mereka.

Achmad optimistis *blockchain* akan bisa beradaptasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat di Tanah Air, khususnya masyarakat industri keuangan. Namun, waktunya masih belum bisa dipastikan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan oleh pegiat *blockchain* agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat industri keuangan di dalam negeri.

“Ini akan sama seperti Uber, awalnya tidak diterima dan akhirnya bisa diterima sekarang. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri masih belum tahu mau dibawa ke mana regulasi mengenai *blockchain* ini. Ini adalah barang masa depan. Ini juga akan mendukung keterbukaan informasi yang ada di perbankan,” ungkapnya.

Meski *blockchain* menjanjikan kemudahan pelayanan dengan biaya yang rendah, belum ada perusahaan dari industri keuangan yang menggunakannya. Mereka masih *wait and see*

terhadap barang baru ini. Inilah yang membuat perkembangan *blockchain* di Tanah Air sedikit terhambat.

Berbeda dengan industri keuangan yang ada di negara tetangga, dalam hal ini Singapura. Beberapa perbankan di sana sudah menerapkan *blockchain*, meski baru dilakukan untuk lingkup internal. Ke depan, *blockchain* ini akan lebih digunakan dalam lingkup yang lebih luas sehingga makin bisa memberikan manfaat positif bagi setiap penggunanya.

Kustiawan Kusumo, *Enterprise Director* Microsoft Indonesia, mengatakan, industri perbankan adalah industri yang paling berpengaruh dengan diberlakukannya *blockchain*. Pasalnya, tanpa perlu datang ke kantor cabang, transaksi perbankan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama 24 jam penuh. Mulai dari transfer, penyimpanan

dan pengambilan uang, pengajuan kredit, pembayaran internasional, hingga kliring.

Pada 2016 perbandingan rasio interaksi berbasis digital dengan tatap muka bahkan mencapai 400 : 1. Kondisi ini akan terus berkembang mengingat jumlah pengguna *mobile connection* di Indonesia mencapai 318 juta atau 125% dari total populasi.



Oscar Darmawan; lebih efisien dan efektif

**Inilah fungsinya
blockchain, mengantisipasi
human error tersebut.
Blockchain ini juga tidak
akan berhenti pada tahun
ini atau tahun depan
sebagai *hot topic*.**

Perlu Dukungan Regulator

Terkait dengan penerapan *blockchain*, Andreuw Th. A. F., Direktur *Business Data Center & Manage Service* Telkomsigma, mengatakan, semua pelaku industri di Tanah Air masih saling tunggu. Pasalnya, masih belum ada regulasi yang jelas yang mengatur keberadaan *blockchain* tersebut.

“Semuanya masih *wait and see* karena yang dikhawatirkan ialah adanya *global currency*. Ini disebabkan data yang ada di dalam *blockchain* itu tersebar di seluruh dunia. Regulasi yang ada di Indonesia belum boleh seperti itu. Semua *data center* harus ada di dalam negeri. Dan, ini yang harus

dipastikan kembali mengenai regulasinya ke regulator,” jelasnya.

Meski belum bisa memastikan keberadaan *blockchain* akan seperti apa ke depan, Andreuw mengakui bahwa persebaran *blockchain* memang sudah merata belakangan ini. Tidak hanya di luar negeri. Beberapa perusahaan di dalam negeri juga sudah ada yang menggunakannya. ■

Butuh Waktu dan Kajian Mendalam

Teknologi perbankan terus berkembang, salah satunya adalah *blockchain* yang diyakini akan ikut mengembangkan industri perbankan. Namun, penerapannya membutuhkan waktu dan kajian yang mendalam.

Kemajuan dan inovasi teknologi memang diperlukan, termasuk pada industri perbankan. Kemajuan teknologi akan mengubah kebiasaan dan perilaku nasabah atau konsumen. Tak hanya itu, proses bisnis perusahaan pun bisa berubah, makin efektif dan efisien.

Pengembangan teknologi pada industri perbankan dilakukan seiring dengan perubahan dan kebutuhan yang ada. Hal ini makin membuat industri perbankan menyusun bermacam strategi untuk menghadapi perubahan yang makin cepat tersebut. Tidak hanya untuk menjaga kualitas bisnis, tapi juga untuk menentukan dan mengelola risiko yang juga ikut berkembang.

Saat ini teknologi yang tengah berkembang dan menjadi isu utama di kalangan perbankan ialah penerapan teknologi *blockchain*.

Teknologi ini dinilai punya kelebihan tersendiri, di antaranya lebih efisien karena bisa menekan biaya transaksi, transparan karena dapat diakses publik, keamanannya tinggi, serta mampu meminimalisasi kasus *human error* karena semua transaksi nantinya dikomputerisasi dan tercatat secara otomatis.

Kendati demikian, untuk pengembangan teknologi *blockchain* pada perbankan nasional masih menjadi hal baru dan butuh kajian yang mendalam. Salah satunya terkait dengan sistem keamanan.

Menurut Altona Widjaja, *Chief Inspiration Officer* OCBC Fintech Office and Innovation Group, edukasi mengenai *blockchain* di perbankan masih terus dilakukan. Sangat terbukanya informasi yang terdapat di dalam *blockchain* masih menjadi pembahasan yang hangat sampai dengan saat ini.

Edukasi masih sangat diperlukan karena potensi yang bisa dihasilkan dengan menerapkan *blockchain* ini sangat besar.



Seminar tentang *blockchain*; edukasi masih perlu

Selain itu, tantangan yang ada di dalamnya besar, terutama untuk mengintegrasikan dengan sistem yang sudah berjalan.

Menurutnya, setiap informasi yang ada di *blockchain* bisa diketahui oleh siapa saja yang ada di dalamnya, terutama para pelaku industri perbankan. Namun, kerahasiaan bank masih harus menjadi hal yang diutamakan di Indonesia sehingga tidak semua pihak bisa melihat setiap informasi atau transaksi nasabah.

“Yang dijanjikan *blockchain* adalah efisiensi. Setiap kali ada *payment*, selalu ada rekonsiliasi dan ini biayanya mahal sekali. Melalui *blockchain*, rekonsiliasi ini sudah tidak diperlukan lagi dan ini langsung terjadi di dalam *blockchain*,” jelas Altona.

Keuntungan lain dari penerapan *blockchain* ialah data tidak bisa diganti. Ini dilakukan untuk menghindari data ganda atau

fraud yang mungkin terjadi pada setiap transaksi perbankan. Tidak hanya itu, meski belum teruji secara maksimal di sektor perbankan, keamanan yang ada pada *blockchain* terbilang cukup baik.

Namun, *blockchain*, yang merupakan kategori teknologi baru, dinilai tidak akan bisa diterapkan dalam waktu dekat. Altona mengatakan, penerapan teknologi ini paling cepat memakan waktu 7-10 tahun ke depan. Pasalnya, masih perlu arahan dari setiap bank sentral yang ada di tiap-tiap negara.

“Jadi, penerapan ini agak lama karena *blockchain* merupakan teknologi baru. Bitcoin itu sudah bergerak dari 2008. Perbankan baru melihat ini sejak dua tahun belakangan ini. Kalau di Singapura sudah berjalan, kemungkinan perlu waktu 1-2 tahun lagi supaya hal yang sama bisa berjalan di Indonesia,” tambahnya.

Masih menurut Altona, meski penerapannya memakan waktu lama, OCBC Singapura sudah banyak melakukan kajian untuk menerapkan *blockchain* secara internal terlebih dulu. Penerapan ini dilakukan secara regional terlebih dulu, setelah sukses akan dilanjutkan secara global sebelum terkoneksi dengan semua perbankan di seluruh dunia.

Blockchain adalah teknologi yang bisa dipelajari dan diterapkan di institusi keuangan, termasuk perbankan. Selama ada keinginan dari para pelaku industri, penerapan *blockchain* akan terjadi lebih cepat lagi.

Hal lain yang membuat penerapan *blockchain* di Tanah Air kian lama ialah belum adanya infrastruktur perbankan yang sesuai dengan sistem *blockchain*. Selain itu, penerapan *single ID* belum ada kelanjutannya sampai dengan saat ini.

“Banyak yang bilang kalau sudah ada *blockchain*, tidak perlu perbankan. Justru, lebih baik bank yang *represent blockchain*. Jadi, nanti bank yang identifikasi dan menetapkan, mirip seperti pasar modal yang ada di Indonesia,” tambah Altona.

Dia menegaskan, sebenarnya penerapan *blockchain* di industri perbankan tidak harus diketahui oleh masyarakat yang menggunakan jasa perbankan. Yang diperlukan masyarakat ialah kemudahan bertransaksi dan kemurahan biaya yang dikenakan sehingga penerapan *blockchain* di industri perbankan benar-benar memberikan manfaat bagi setiap pelaku yang ada di dalamnya.

Meski dianggap memberikan banyak solusi untuk industri keuangan, *blockchain* bukan alat super yang mampu mengatasi semua masalah yang ada di industri. Beberapa masalah mungkin bisa diatasi dengan *blockchain*, tapi masalah-masalah lainnya tidak demikian.

Pihak perbankan juga masih banyak melakukan kajian dari berbagai sudut mengenai sistem dan teknologi penunjang industri. Karena itu, penerapan *blockchain* di industri perbankan Tanah Air seakan-akan menjadi lebih lambat dari negeri tetangga.

“*Blockchain* memang tidak bisa langsung menggantikan *platform* yang ada di perbankan. Sistem-sistem tersebut harus diintegrasikan. Sampai dengan saat ini masih belum ada perbankan Indonesia yang memakai *blockchain*. Di Singapura sudah ada, tapi masih terbatas pada produk tertentu, belum menyeluruh,” jelas Altona.

Perlu Dukungan Pelaku Industri dan Regulator

Rico Ustavia Frans, *Managing Director* Bank Mandiri, mengatakan,

penerapan *blockchain* di dalam negeri merupakan terobosan baru yang baik. Kendati demikian, untuk bisa menerapkan teknologi baru tersebut dibutuhkan keinginan dari para pelaku industrinya, termasuk juga dari regulator.

“Saya tidak keberatan dengan penerapan *blockchain*. Teknologinya sudah bagus. Ini *‘kan distributed ledger*, jadi harus ada dulu komunitasnya. Bagaimana mau jalan kalau tidak bisa didistribusikan. Itu harus ada yang mulai,” jelasnya.

Menurutnya, *blockchain* bisa saja diterapkan dengan cepat jika tidak mengandung isu sensitif di dalamnya, isu yang berkaitan dengan regulator. Kalau sudah ada komunitasnya, *blockchain* bisa langsung berjalan dan implementasi tersebut bisa menjadi rujukan bagi komunitas lainnya yang berhubungan dengan regulator.

Rico juga optimistis bahwa penerapan *blockchain* di Tanah Air juga akan mendapatkan dukungan dari regulator. Adanya Bank Indonesia Fintech Office akan menjadi wadah bagi perkembangan *blockchain* tersebut. Sehingga, penerapan *blockchain* ke

depannya bisa sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia.

“Intinya, semua masih harus dieksplor lagi lebih dalam. Teknologi ini sebenarnya sudah cocok ke depannya. Namun, penerapannya masih belum tahu perlu berapa lama,” pungkasnya. ■



Rico Ustavia Frans; terobosan baru

“Yang dijanjikan *blockchain* adalah efisiensi. Setiap kali ada *payment*, selalu ada rekonsiliasi dan ini biayanya mahal sekali. Melalui *blockchain*, rekonsiliasi ini sudah tidak diperlukan lagi dan ini langsung terjadi di dalam *blockchain*,”

Perlu Pertimbangan dan Tahapan

Blockchain telah berkembang sejak beberapa tahun terakhir di kancah global. Dengan *blockchain*, proses bisnis dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Bagaimana regulasinya?

Teknologi di industri jasa keuangan, termasuk perbankan, terus berkembang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, data transaksi yang menggunakan teknologi selama 2015 mencapai US\$590 miliar atau meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu salah satunya didorong oleh pesatnya perkembangan industri *financial technology (fintech)* di Indonesia. *Fintech* merupakan pemain baru yang cukup aktif di industri keuangan Tanah Air.

Perkembangan tersebut tentu harus diiringi dengan regulasi yang mumpuni agar industri bisa berkembang dan nasabah aman dalam bertransaksi. OJK pun menyiapkan regulasi *fintech* yang dapat mendorong inklusi keuangan sambil tetap memperhatikan perlindungan konsumen.

Penggunaan teknologi untuk mengembangkan industri jasa keuangan terus bermunculan. Saat ini muncul wacana penggunaan teknologi terbaru, yakni *blockchain*. Teknologi ini telah berkembang sejak beberapa tahun terakhir di kancah global. Bahkan, World Economic Forum menyebut *blockchain* sebagai salah satu teknologi paling inovatif pada 2016. Dengan teknologi ini, proses bisnis dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan.

Tentu saja, perkembangan tersebut harus sejalan dengan regulasi, baik untuk perkembangan industri maupun keamanan nasabah. Aslan Lubis, Analis Bank Eksekutif Divisi Spesialis Profil Industri OJK, mengaku, pihaknya sangat terbuka dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi (TI) di industri keuangan. Menurutnya, hal itu sudah menjadi sebuah kebutuhan industri untuk mengembangkan proses bisnisnya.

Meski demikian, Aslan masih enggan memberikan pendapatnya tentang regulasi yang mengatur *blockchain* ke depan. Pihaknya masih melakukan banyak kajian mengenai teknologi baru tersebut. “Kami masih belum bisa memberikan tanggapan mengenai penerapan ini. Kami juga masih



Aslan Lubis; kebutuhan industri

melakukan kajian sampai saat ini. Nanti juga akan keluar pada waktunya. Namun, untuk sekarang, masih belum ada keputusan dan belum berani mendahului,” jelasnya kepada *Probank*.

Dengan adanya regulasi yang mengatur *blockchain*, Aslan optimistis *blockchain* akan menjadi sebuah keniscayaan di industri keuangan. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi satu lembaga yang bisa mengatur segalanya.

Untuk itu, pihaknya melakukan kajian dengan para *stakeholders*, seperti Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agar *blockchain* bisa berjalan sesuai dengan regulasi. OJK juga perlu mendefinisikan ulang mengenai *blockchain* dilihat dari keamanan dan kenyamanannya, baik untuk pelaku industri maupun

nasabahnya.

“Intinya, masyarakat kita ini banyak preferensi, banyak pertimbangan. Ini sama seperti dulu, ketika ada *internet banking*. Dulu masih banyak yang tidak mau. Sekarang, seiring berjalannya waktu, sudah 70% orang yang menggunakannya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Namun, waktu yang diperlukan pasti akan bertahap untuk mencapai ke sana,” paparnya.

Lebih dari itu, transaksi yang dicatatkan dalam *blockchain* juga tidak dapat dihapus atau diganti. Apabila terjadi kesalahan, pengguna perlu mencatatkan transaksi pengganti untuk mengoreksinya. Dengan begitu, penipuan, pemalsuan, atau korupsi dapat dihindari.

Walaupun bersifat transparan dan terbuka, *blockchain* diklaim tetap menjadi teknologi yang aman karena menerapkan teknologi digital *signature* berbasis kriptografi dalam setiap transaksinya. Setiap kali transaksi dilakukan, *blockchain* akan melakukan autentikasi data pihak-pihak terkait secara *real time* sebelum mengesahkan transaksi tersebut. ■

Vera Eve Lim,
Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Momentum Melakukan Perbaikan

Lambatnya pertumbuhan ekonomi tidak menjadi halangan bagi industri perbankan untuk terus berkembang. Justru, ini merupakan momentum bagi para pelaku industri untuk terus melakukan perbaikan.

Industri perbankan memang mengalami tren perubahan pertumbuhan. Berbeda dengan periode lima tahun lalu dengan rata-rata pertumbuhan perbankan mencapai 20%. Perubahan tren itu antara lain disebabkan oleh ekonomi global yang mengalami perubahan drastis sejak 2008 yang berlanjut sampai dengan saat ini. Selain itu, *size* perbankan yang makin besar tentu berdampak pada peningkatan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang.

Vera Eve Lim, Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk, yang terus mengikuti pertumbuhan industri perbankan nasional, mengatakan bahwa perubahan tren tersebut memberikan dampak positif bagi industri.

Vera memberikan pendapatnya tentang kondisi perbankan saat ini dan beberapa strategi yang akan dilakukannya. Berikut ini petikan wawancara dengannya.

Bagaimana perkembangan perbankan nasional saat ini?

Pertumbuhan memang lebih lambat daripada periode 2010-2015. Namun, hal ini perlu disyukuri karena perbankan Indonesia mampu menjaga kualitas aktiva dengan baik. Setelah lima tahun tumbuh signifikan, sisi *non performing loan (NPL)* yang dimiliki oleh



industri juga masih terjaga. Malah, ada tren menurun sejak akhir 2016 sampai dengan saat ini.

Saya lihat, kondisi perbankan Indonesia masih sangat bagus. Modal yang dimiliki industri juga tinggi, di kisaran 20% yang juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara regional, tinggal bagaimana bank dapat menggunakan modal tersebut untuk perkembangan usaha 3-5 tahun ke depan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Apa dampak dari perlambatan pada industri perbankan?

Perlambatan ini merupakan kesempatan untuk melakukan pembenahan internal seperti transformasi guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, bisnis model yang lebih kompetitif termasuk sisi teknologi juga khususnya yang terkait dengan 'digital banking' seperti meningkatkan kemampuan *mobile banking*, *e-commerce*, *digitalization/automation*, *analytics* dan sejenisnya.

Jadi, saya melihatnya memang terkadang perlu kondisi melambat seperti sekarang. Industri perlu sedikit *cooling down*, tetapi perbankan jangan berdiam diri pada kondisi ini, sebaliknya melakukan transformasi dan re-organisasi agar mampu menyiapkan *the next trend* guna lebih kompetitif di industri.

Demografi di negeri ini didominasi oleh *middle class* dengan segala perkembangan teknologinya yang sangat cepat. Perbankan jangan sampai telat. Industri perbankan harus belajar juga agar bisa selangkah lebih maju.

Yang paling disiapkan dalam menghadapi persaingan digital ialah bisnis digital itu sendiri. Apa yang harus ada di balik bisnis digital tadi. Harus ada ide, produk, dan layanan. Tidak kalah pentingnya ialah sumber daya manusia (SDM) yang harus disiapkan.

Perbankan digital sudah banyak dilakukan perbankan global. Bukan berarti kita bisa *copy paste* produk tersebut untuk dimasukkan ke Indonesia. Harus ada penyesuaian dengan nasabah, *compliance*, *environment*, *service*, *product* dan sebagainya.



Untuk bisa berhasil di Indonesia, kita harus punya *back office* yang harus *improve*. Kita tidak bisa menggunakan *old fashioned banking* lagi. Kita harus pakai bahasa yang lebih mudah dan interaktif. Masih banyak yang harus kita ubah kalau mau masuk digital.

Bagaimana persiapan Bank Danamon menghadapi perubahan tren tersebut?

Jadi, untuk masuk ke digital, kita siapkan dulu *platform*-nya, baru kemudian kita bisa memasarkannya. Tidak ketinggalan *product*, *human resources*, cara pemasaran dan servisnya. Percuma canggih kalau nasabah tidak bisa pakai atau pemakaiannya ribet, pasti juga tidak akan *sellable*.

Saat ini *mobile banking* yang kami miliki sudah cukup bagus. Kemungkinan yang kurang ialah bagian *marketing*-nya. Tahun ini kami masuk ke *top 3* dalam MRI (Marketing Research Indonesia). Ini adalah pencapaian yang baik dalam tujuh tahun terakhir. Sebelumnya kami hanya berada di posisi kedelapan. Ke depannya, kami berharap ada di posisi nomor satu. Yang paling penting dalam servis ialah jualan. Kalau produk bagus tapi tidak bisa jualan, 'kan percuma.

Apa saja yang diperlukan perbankan untuk meningkatkan daya saing?

Saya melihat, ke depannya, bagaimana kemampuan bank untuk memindahkan layanan yang ada saat ini ke *platform mobile*. Ini adalah layanan yang diperlukan generasi sekarang. Jadi, semua transaksi perbankan, bahkan sampai *customer service* bisa dilakukan dari *mobile device*. Daya saing bank adalah kemampuan untuk berinovasi produk layanan. Ini yang pertama.

Kedua, perbankan harus menguatkan jaringan distribusi. Apalagi kalau ingin makin berperan di daerah-daerah. Kami banyak melakukan penetrasi di sektor UKM, dengan semakin banyaknya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah, ke depannya pasti akan ada potensi bisnis-bisnis baru yang butuh pembiayaan di sana. Jadi, kami harus siap untuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan kendaraan niaga, perumahan termasuk juga kartu kredit.

Demografi di negeri ini didominasi oleh *middle class* dengan segala perkembangan teknologinya yang sangat cepat. Perbankan jangan sampai telat. Industri perbankan harus belajar juga agar bisa selangkah lebih maju.

Saya pikir, jaringan ini penting sekali. Bank Danamon akan membangun jaringan mengikuti *pocket-pocket* ekonomi yang akan dikembangkan. Ini yang menaikkan daya saing kami. Dan, ini merupakan kelebihan bank lokal dibandingkan dengan bank asing.

Apakah ada dukungan dari regulator?

Dukungan regulator sangat penting agar bank tetap bisa efisien dan *prudent* mengingat bisnis bank adalah bisnis

berbasis risiko, dan kami melihat antara regulator dan perbankan adalah satu kesatuan guna mendukung perekonomian secara keseluruhan.

Fokus ke mana pengembangan Bank Danamon untuk saat ini dan ke depan?

Backbone kami adalah usaha kecil dan menengah (UKM). Bukan UKM yang besar, kami bicara yang modal kerjanya di bawah Rp10 miliar, rata-rata Rp5 miliar. Inilah sasaran utama kami dalam menawarkan

Untuk bisa berhasil di Indonesia, kita harus punya *back office* yang harus *improve*. Kita tidak bisa menggunakan *old fashioned banking* lagi. Kita harus pakai bahasa yang lebih mudah dan interaktif. Masih banyak yang harus kita ubah kalau mau masuk digital.

pembiayaan UKM termasuk jika diperlukan pembiayaan tempat usaha seperti pembiayaan ruko. Kami selalu memikirkan bagaimana UKM menjadi lebih besar di Bank Danamon. Saat ini porsi UKM masih di kisaran 18%. Kami berencana UKM bisa mencapai porsi 25% dari total bisnis Bank Danamon.

Di atas UKM masih ada nasabah komersial yang juga menjadi usaha kami. Sedangkan untuk nasabah korporasi yang besar-besar, kami tidak memiliki kapasitas membiayai di mana bank bank besar lebih mampu membiayainya. Akan tetapi, kami dapat membiayai *supply chain* dari nasabah korporasi jika besaran pembiayaan tidak besar.

Kami juga fokus ke *trade finance*. Di sini tumbuhnya cukup tinggi rata-rata 40%. Ini bisa bicara *letter of credit (L/C)*, *bank guarantee* termasuk *cash loan*. Kredit ini terkait dengan pembiayaan perdagangan, ekspor atau impor yang mencakup antarwilayah di dalam negeri maupun luar negeri, tetapi target kami tetap di kelas menengah.

Bagaimana peran asosiasi, dalam hal ini Perbanas, terhadap industri perbankan?

Asosiasi masih berperan untuk memfasilitasi komunikasi bank-bank yang ada di dalamnya terutama dengan regulator yang saat ini berjalan dengan baik. Perbanas juga membantu perbankan mendalami *trend digital* dan sebagainya.

Bagaimana peran Anda di Perbanas?

Saya ada di bagian pengkajian dan pengembangan perbankan, di antaranya mengkaji peraturan baru dan memberikan masukan ke industri dan regulator termasuk masukan dari bank-bank yang perlu disampaikan seperti mengusulkan regulasi apa yang bisa diterapkan agar industri bisa lebih bagus lagi. ■



Memilih Jadi Profesional

Terlahir dari keluarga pebisnis tidak serta-merta membuat Vera Eve Lim menjadi pebisnis pula. Vera justru merasa agak bosan dengan lingkungan bisnis yang ada di sekitarnya. Ia pun memutuskan untuk menjadi wanita karier saja.

Jalur perbankan yang dipilihnya juga bukan sesuatu yang mendadak. Terbiasa diajak ke bank oleh kedua orang tuanya sejak kecil membuat dirinya tertarik dengan industri ini.

"Seluruh keluarga saya pebisnis, bahkan sepupu saya juga pebisnis. Jadi, tidak ada salahnya kalau saya masuk jalur profesional. Saya menetapkan untuk masuk ke industri keuangan karena tidak ada negara yang bisa hidup kalau tidak ada industri keuangan, terutama perbankan," akunya.

Wanita yang memiliki hobi melukis dan fotografi ini memiliki filosofi hidup yang masih dipegang erat sampai dengan sekarang, disiplin. Hidup disiplin memang tidak mudah. Namun, dengan sikap ini, ia bisa meniti karier sampai di posisinya saat ini. Selain disiplin, Vera memiliki perencanaan yang matang dan integritas yang tinggi.

Gairah Perbankan Negeri Ginseng

Iklim perbankan Indonesia dan Korea Selatan yang tidak jauh berbeda memudahkan bagi kedua negara untuk melakukan kerja sama di sektor perbankan. Sudah ada beberapa bank asal Korea Selatan yang masuk ke Indonesia. Sebaliknya, Korea Selatan pun memberikan peluang kepada perbankan Indonesia untuk membuka cabang di sana.

Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Korea Selatan pada Mei 2016 berdampak positif terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan. Salah satunya di sektor perbankan. Kerja sama perbankan antara Indonesia dan Korea Selatan selama ini terjalin dengan baik. Perbankan Korea Selatan melalui Korea Selatan Federation of Banks (KFB) pada 12 April 2017 melakukan kerja sama dengan Perbanas. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan hubungan kedua negara, khususnya di sektor perbankan, lebih erat lagi. Sebelumnya sudah ada beberapa bank asal Negeri Ginseng yang menggandeng bank lokal, seperti Bank Woori, Bank Shinhan, dan Hana KEB.

Sudah selayaknya kita menyambut baik niat Korea Selatan melalui KFB melakukan kerja sama, khususnya dalam bidang perbankan. Selama ini kinerja bank-bank Korea Selatan di Indonesia memang tidak mengecewakan. "Mereka punya komitmen *kok*," ujar Aviliani, pengamat perbankan. Bahkan, menurut Aviliani, kemajuan bidang teknologi Korea Selatan bisa menjadi nilai tambah bagi perbankan Indonesia, terutama bagi yang ingin bermitra dengan bank-bank dari Korea Selatan.

Setelah krisis global pada 2008, ekspansi perbankan Korea Selatan ke negara-negara lain, seperti Indonesia, memang kian meningkat. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada 2009, setahun setelah krisis global, lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok. Perbankan Korea Selatan melihat ada potensi di negara lain seperti Indonesia hingga mereka pun

melakukan ekspansi. Salah satu cara yang dilakukan bank-bank Korea Selatan di negara-negara tujuan ekspansi ialah menggandeng bank-bank lokal.

Saat krisis ekonomi 1998, perekonomian di beberapa negara Asia sempat terpuruk. Sektor perbankan mengalami kejatuhan. Tentu ada berkah di balik krisis tersebut. Dari krisis tadi, pelaku bisnis perbankan bisa mengambil pelajaran bahwa mereka harus banyak melakukan pembenahan. Pascakrisis 1998, perbankan di Asia memang makin membaik dan satu sama lain pun siap melakukan kerja sama.

Menurut Yung-Ku Ha, *CEO & Chairman* KFB, banyak bank asing yang membuka cabang di Korea Selatan. Bila sebelumnya bank-bank dari Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa yang membuka cabang di Korea Selatan, sekarang kondisinya berubah. Bank-bank dari Tiongkok, India, dan Singapura yang banyak membuka cabang di Korea Selatan.

Makin membaiknya hubungan dagang antara Indonesia dan Korea Selatan berdampak ke hubungan di sektor lainnya, yang meningkat. Menurut data Census and Economic Information Center (CEIC), pada 2016 ekspor Indonesia ke Korea Selatan

mencapai US\$7,0 miliar. Korea Selatan berada di urutan keenam tujuan ekspor Indonesia setelah Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Singapura, dan India. Pada periode yang sama, impor Indonesia dari Korea Selatan mencapai US\$6,6 miliar atau Korea Selatan menduduki urutan ketujuh importir Indonesia. Investasi Korea Selatan di Indonesia pada 2016 mencapai US\$0,4 miliar. Dari nilai investasi itu, paling banyak diinvestasikan



Bank di Korea Selatan; semakin terbuka

di sektor manufaktur.

Mengingat kebutuhan transaksi bisnis, masuknya investor Korea Selatan ke Indonesia diikuti dengan perbankannya. Dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia, perbankan Korea Selatan menggandeng bank-bank lokal. Bagi pelaku bisnis perbankan di Indonesia, masuknya investor Korea Selatan bisa menjadi mitra bisnis yang patut diperhitungkan. Iklim perbankan Korea Selatan tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Jadi, dalam menjalankan bisnis di Indonesia, mereka tidak terlalu sulit beradaptasi dengan regulasi perbankan yang ada.

Di bidang teknologi, salah satu sektor bisnis yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Korea Selatan ialah *financial technology (fintech)*. Pemerintah Korea Selatan berkomitmen untuk meluncurkan regulasi yang memudahkan bagi berkembangnya *fintech* di Korea Selatan. Beberapa kebijakan terkait dengan pengembangan teknologi di industri jasa keuangan ditargetkan dapat diimplementasikan pada 2017. Misalnya, penggunaan tenaga robot sebagai pengganti tenaga



Sumber: Census and Economic Information Center (CEIC)

manusia sebagai *financial advisor* yang target implementasinya pada semester kedua 2017.

Di Korea Selatan sendiri orientasi bisnis perbankan banyak mengalami perubahan setelah krisis ekonomi 1998. Bila sebelumnya bank banyak yang membiayai sektor korporasi, setelah krisis bisnis mereka banyak yang bergeser ke *consumer banking*. Warna bisnis bank-bank Korea Selatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh basis bisnis mereka

di Korea Selatan. Yang berbasis *corporate banking* akan memfokuskan diri pada *corporate banking*. Demikian halnya yang berbasis *consumer banking*.

Woori Bank dan Shinhan Bank di Korea Selatan, misalnya, memiliki orientasi bisnis yang berimbang antara *corporate banking* dan *consumer banking*. Saat berekspansi ke Indonesia, bisnis mereka pun tidak berbeda jauh dengan induknya di Korea Selatan. Potensi pasar Indonesia yang masih cukup tinggi masih menarik bagi perbankan Korea Selatan. Tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa bank dari Korea Selatan yang akan menggandeng mitra dari Indonesia. ■

Ingin Tumbuh Bersama

Melihat potensi Indonesia yang cukup bagus, minat investor Korea Selatan untuk berbisnis perbankan di Indonesia pun kian meningkat. Pelaku bisnis perbankan Korea Selatan kian banyak yang bermitra dengan bank lokal. Regulasi perbankan Indonesia yang makin baik mendorong Korea Selatan Federation of Banks (KFB) untuk melakukan kerja sama dengan Perbanas.

Bagaimana pelaku industri perbankan Korea Selatan melihat perbankan Indonesia? Berikut petikan wawancara *Probank* dengan Yung-Ku Ha, *CEO & Chairman* KFB, di sela-sela “Indonesia-Korea Selatan Financial Cooperation Forum” yang diselenggarakan pada 12 April 2017, di Fairmont Hotel Jakarta.

Bagaimana sistem pengawasan perbankan di Korea Selatan?

Seperti halnya perbankan Indonesia, perbankan Korea Selatan belajar dari krisis ekonomi 1998. Sebelum krisis, pengawasan perbankan dilakukan oleh bank sentral Korea Selatan. Namun, setelah krisis, pengawasan perbankan dan industri keuangan yang lainnya dilakukan oleh Financial Services Commission. Pengawasan perbankan di Korea Selatan sangat ketat dan kami sudah mengarah ke penerapan Basel III.



Keuntungan apa yang diperoleh perbankan Korea Selatan dengan membuka peluang kerja sama dengan perbankan Indonesia?

Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin selama 15 tahun terus berkembang. Bahkan, investasi Korea Selatan di Indonesia menduduki urutan ketiga setelah Jepang dan Singapura. Kami berharap hubungan terus berlanjut dan kita bisa tumbuh bersama-sama.

Melihat banyaknya bank Korea Selatan yang menggandeng bank lokal di Indonesia, bagaimana peluang perbankan Indonesia membuka cabang di Korea Selatan?

Kami sangat terbuka dengan bank-bank asing yang akan membuka kantor cabang di Korea Selatan. Bank Negara Indonesia (BNI) adalah salah satu bank Indonesia yang membuka kantor cabang di Korea Selatan. Pada 1967 bank-bank asing yang ada di Korea Selatan adalah bank-bank dari Amerika Serikat, Eropa,

dan Jepang, seperti Citibank, Chase Manhattan Bank, dan Bank of Tokyo Mitsubishi.

Mereka membuka kantor cabang di Korea Selatan dengan tujuan menyediakan mata uang asing yang dibutuhkan untuk kegiatan perdagangan. Namun, sekarang situasinya sudah berubah. Bank-bank dari negara *emerging market* sudah banyak yang beroperasi di Korea Selatan, seperti bank dari India, Cina (Tiongkok).

Rekening yang Dijamin LPS Meningkatkan

Jumlah rekening yang dijamin LPS pada posisi Februari 2017 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Simpanan dengan nilai saldo Rp2 miliar jumlah rekeningnya meningkat 1,64% ketimbang Januari 2017.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merilis data mengenai pertumbuhan jumlah rekening dan nominal simpanan yang dijamin pada bank umum untuk posisi Februari 2017. Total rekening simpanan yang dijamin hingga bulan tersebut mencapai 202.160.883 rekening. Itu artinya, jumlahnya bertambah 2.116.754 rekening atau naik 1,06% dibandingkan dengan posisi Januari 2017 yang tercatat 200.044.129 rekening.

Sekretaris Lembaga LPS, Samsu Adi Nugroho, mengatakan, jumlah rekening simpanan dengan nilai saldo sampai dengan Rp2 miliar meningkat 1,64% (*month on month*), dari 199.805.221 rekening pada posisi Januari 2017 menjadi 201.921.565 rekening pada Februari 2017. Sedangkan, jumlah nominal simpanan mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 0,01% (*mom*), dari Rp2.127,98 triliun pada akhir Januari 2017 menjadi Rp2.127,67 triliun pada Februari 2017.

Untuk simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar, jumlah rekeningnya naik 0,17% (*mom*) dari 238.908 rekening pada Januari 2017 menjadi 239.318 rekening pada Februari 2017. Jumlah nominal simpanan juga naik 0,94% (*mom*) dari Rp2.769,17 triliun pada Januari 2017 menjadi Rp2.795,14 triliun pada Februari 2017.

Berdasarkan jenis simpanannya, yaitu giro, tabungan, dan deposito, jenis simpanan yang jumlah rekeningnya mengalami kenaikan paling tinggi adalah tabungan. Kenaikannya mencapai 1,11% dari 193.247.023 rekening pada Januari 2017 menjadi 195.389.106 rekening pada Februari 2017. Sementara, kenaikan nominal simpanan tertinggi dicatatkan deposito,



Layanan nasabah; pemahaman meningkat

yakni sebesar 1,08% dari Rp2.167 triliun pada Januari 2017 menjadi Rp2.191 triliun pada Februari 2017.

“Bila dilihat dari jenis mata uang, jumlah rekening simpanan dan nominal simpanan yang dijamin dalam rupiah meningkat. Sedangkan, untuk jumlah rekening simpanan dan nominal simpanan yang dijamin dalam valas, menurun dari bulan sebelumnya,” ujar Samsu dalam keterangan persnya.

Samsu menambahkan, peningkatan jumlah rekening simpanan yang dijamin dalam rupiah tercatat 1,06% (*mom*), dari 198.989.396 rekening per akhir Januari 2017 menjadi 201.107.759 rekening per akhir Februari 2017. Sementara, untuk rekening simpanan dalam valas, jumlahnya menurun dari 1.054.733 rekening pada Januari 2017 menjadi 1.053.124 rekening pada Februari 2017.

Dilihat dari sisi nominal, simpanan dalam mata uang rupiah naik 0,71% (*mom*) dari Rp4.154 triliun pada Januari 2017

menjadi Rp4.184 triliun per Februari 2017. Sementara, untuk simpanan dalam valas, jumlahnya menurun 0,53% (*mom*) dari Rp742,4 triliun pada Januari 2017 menjadi Rp738,4 triliun pada Februari 2017.

Pada Februari 2017 total simpanan di bank umum tercatat meningkat Rp25,6 triliun atau 0,52% (*mom*) dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2017, yakni menjadi Rp4.922 triliun. Pada periode tersebut jumlah bank umum peserta penjaminan tercatat 115 bank, yang terdiri atas 102 bank umum konvensional dan 13 bank umum syariah. Bank umum konvensional terdiri atas 4 bank pemerintah, 25 bank pembangunan daerah (BPD), 64 bank umum swasta nasional, dan 9 kantor cabang bank asing. “Jumlah bank umum berkurang satu bank dengan adanya izin *self liquidation* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Kantor Cabang The Royal Bank of Scotland N.V. di Indonesia pada tanggal 28 Februari 2017,” terang Samsu.

Dorong Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap program penjaminan LPS akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Karena itu, LPS terus berupaya melakukan berbagai program sosialisasi di masyarakat. Dengan kehadiran LPS, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan perbankan makin tinggi.

Pendirian LPS sendiri dilatarbelakangi oleh krisis moneter pada 1998. Saat itu pemerintah menerapkan kebijakan *blanket*



Samsu Adi Nugroho;
simpanan rupiah meningkat

guarantee untuk menghidupi industri perbankan yang terpuak akibat krisis tersebut. Selain membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan *moral hazard* dari para pengelola bank. Berdasarkan pengalaman itu, pemerintah akhirnya mendirikan LPS sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004.

Dengan mengetahui bahwa uang simpanannya dijamin UU melalui LPS, diharapkan makin banyak masyarakat yang tertarik menjadi nasabah bank. “Program penjaminan simpanan ini perlu diketahui dan dipahami masyarakat untuk memberikan rasa aman, tenang, dan pasti,” ujar Poltak L.

Tobing, *Executive Vice President* LPS.

Kehadiran LPS kian vital dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan di Tanah Air—bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), OJK, dan Bank Indonesia (BI). Sehingga, perekonomian nasional makin tangguh dan tumbuh secara berkesinambungan.

Hingga Desember 2016, ada 1.914 bank yang menjadi peserta program penjaminan LPS. Jumlah tersebut terdiri atas 117 bank umum dan 1.797 BPR. Sementara, dari sisi jumlah rekening, ada sekitar 200 juta rekening dengan nilai simpanan mencapai Rp4.897 triliun yang dijamin LPS per Januari 2017. Nilai tersebut meningkat hampir dua kali lipat dari awal 2012 yang tercatat Rp2.812 triliun dengan jumlah rekening 100 juta rekening. ■

LPS Selesaikan Pembayaran Klaim Rp168,51 Miliar

Pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku telah melakukan penanganan simpanan kepada nasabah yang banknya dicabut izin operasinya sepanjang 2016. “LPS telah melakukan penanganan simpanan di 76 bank yang dicabut izin usahanya dan telah selesai proses *recovery*-nya,” ujar Poltak L. Tobing, *Executive Vice President* LPS.

Sepanjang 2016 LPS telah membayarkan klaim kepada nasabah bank yang dicabut izinnya sebesar Rp168,51 miliar dengan jumlah rekening yang telah dibayarkan simpanannya mencapai 36.513 rekening. Sejak LPS beroperasi pada 2005, klaim yang telah dibayarkan LPS mencapai Rp1,176 triliun dengan jumlah rekening 152.883 rekening.

Selama pembayaran klaim pada 2016, terdapat 2.033 rekening tak layak bayar yang sebagian besar disebabkan karena pemilik rekening terkait dengan

kasus kredit macet. “Hanya ada 16 rekening tidak layak bayar yang karena bunga simpanannya di atas bunga penjaminan LPS. Artinya, masyarakat semakin tahu dan paham mengenai ketentuan persyaratan layak bayar dan simpanan yang dijamin,” tutur Fauzi Ichsan, Kepala Eksekutif LPS.

Sepanjang 2016 LPS telah melikuidasi 10 BPR dan BPRS yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kesepuluh bank tersebut tersebar di beberapa provinsi, yakni tiga bank di Jawa Timur, dua bank di Sumatra Barat, dua bank di Jawa Barat, satu bank di Yogyakarta, satu bank di Sulawesi Selatan, dan satu bank di Sulawesi Tenggara.

Hingga saat ini, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 76 bank, yakni 1 bank umum, 70 BPR, dan 5 BPRS. Dari ke-76 bank tersebut, yang telah selesai proses likuidasinya sebanyak 63 bank.

Mencegah Fraud Bilyet Berlanjut

Regulasi yang ketat di industri perbankan ternyata tak menyurutkan niat para pelaku *fraud* untuk berbuat kecurangan. Belakangan ini muncul satu kasus *fraud* pada bilyet deposito.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian serius pada tindak kejahatan di industri perbankan belakangan ini. Salah satu kasus yang mencuat belum lama ini ialah kasus penipuan (*fraud*) pada bilyet deposito yang ikut melibatkan orang dalam sebuah bank.

OJK sudah mengimbuai setiap pelaku industri untuk menjadikan kasus *fraud* bilyet tersebut sebagai pelajaran. Tak hanya itu, perbankan juga diminta untuk bisa meminimalkan setiap tindakan *fraud* yang terjadi di bank. Menurut catatan OJK, dari hasil pengawasan terhadap kasus-kasus perbankan, sebagian besar kasus *fraud* terjadi karena adanya peran orang dalam yang mengetahui celah dalam sistem bank tersebut. Selain itu, kasus penipuan yang terjadi kebanyakan didukung oleh kurang pedulinya para nasabah dan terlalu percayanya nasabah pada pihak perbankan.

***Fraud* di industri perbankan sering kali terjadi karena adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Salah satunya, pembukaan rekening di kantor kas. Padahal, kantor kas seharusnya hanya bisa melayani setoran dan pembayaran.**



Layanan perbankan; nasabah terlalu percaya

Fraud di industri perbankan sering kali terjadi karena adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Salah satunya, pembukaan rekening di kantor kas. Padahal, kantor kas seharusnya hanya bisa melayani setoran dan pembayaran.

Irwan Lubis, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, mengatakan, ada tiga pelanggaran yang sering terjadi pada kasus *fraud* bilyet. Satu, tidak dilakukannya pembukaan rekening secara tatap muka. Padahal, menurut ketentuan, untuk mengetahui informasi nasabah secara terperinci, harus dilakukan secara tatap muka.

Dua, tidak berjalannya pengendalian internal. Tiga, adanya indikasi kuat terjadinya konspirasi antara pegawai bank dengan mediator pemilik dana. "Oleh karena itu, upaya dari kami mengembalikan fungsi kantor kas menjadi hanya melayani setoran dan pembayaran," ujar Irwan kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad, menerangkan bahwa pembatasan-pembatasan yang diterapkan OJK bukan untuk menghambat bank dalam mengembangkan bisnisnya. “Membatasi dalam artian bukan tidak boleh berkembang. Namun, untuk secara benar menerapkan prinsip kehati-hatian. Misalnya, kalau membuka rekening tidak boleh di kantor kas, harus di cabang terdekat. Buka rekening orangnya harus datang. Ya yang *kayak-kayak gitulah*,” ujarnya.

Muliaman pun meminta perbankan untuk memperkuat manajemen pengelolaan tindak kejahatan perbankan (*fraud management*). Jika hal itu dilanggar atau kurang diperhatikan sehingga menimbulkan kerugian pada nasabah, Muliaman memastikan bahwa akan ada sanksi bagi bank yang bersangkutan.

Industri perbankan harus mulai mencermati sejumlah modus yang kerap kali ditemui pada setiap kasus kejahatan atau *fraud*. Biasanya, kasus *fraud* ini terjadi karena dua hal, yaitu penyaluran kredit dan efek negatif implementasi *digital banking*.

Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, yang juga Ketua Umum Perbanas, mengakui, *fraud* terbesar terjadi ketika proses pemberian kredit. “Biasanya dilakukan dengan melakukan pemalsuan laporan keuangan, dokumen, dan data penjualan,” jelasnya pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tentang kinerja dan kasus di perbankan pada akhir Maret 2017.

Menurut data Bank Mandiri, cara yang paling sering digunakan pelaku pada kasus *fraud* kredit adalah memailitkan diri sendiri. Setidaknya, ada 17 kasus kepailitan yang sedang ditangani Bank Mandiri. Modus lainnya adalah memalsukan dokumen-dokumen yang ada, baik *bank guarantee* maupun bilyet deposito.

Fraud lainnya yang sering terjadi adalah akibat penerapan *digital banking*. Suprajarto, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), mengatakan, *fraud* dari sisi ini biasanya dilakukan dengan cara yang cukup variatif. “Biasanya modus yang sering digunakan adalah melakukan *skimming* dengan menggandakan pita magnetik dan *phising* dengan mengkloning dan memodifikasi *website* seolah seperti asli,” jelasnya.

Ada pula modus *SIM swap*, yakni dengan penggantian kartu *SIM*. Terkait dengan hal itu, pelaku biasanya bekerja sama dengan agen atau *outlet* seluler untuk bisa mendapatkan akses terhadap kartu *SIM* korban.



Suprajarto; caranya variatif

Industri perbankan harus mulai mencermati sejumlah modus yang kerap kali ditemui pada setiap kasus kejahatan atau *fraud*. Biasanya, kasus *fraud* ini terjadi karena dua hal, yaitu penyaluran kredit dan efek negatif implementasi *digital banking*.

Untuk beberapa kasus *fraud* tersebut, BRI dan Bank Mandiri mengaku akan mengganti dana nasabah jika terbukti ada kesalahan pada sistem perbankan. Penanganan yang ada akan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Transaksi Bilyet Diperketat

Terkait dengan munculnya tindakan *fraud* di industri perbankan, terutama yang berhubungan dengan bilyet deposito, regulator mesti segera memperbaiki aturan yang ada. Hal itu diperlukan agar tidak ada lagi nasabah perbankan yang dirugikan.

Sejumlah perbaikan pun dilakukan regulator. Salah satunya, transaksi bilyet giro makin diperketat oleh Bank

Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro yang dilengkapi Surat Edaran (SE) BI No. 18/40/DPSP tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh BI yang berlaku mulai 1 April tahun ini.

Kedua aturan tersebut mengatur detail atas transaksi giro dan mulai masa berlaku bilyet giro, dari semula maksimal 70 hari plus 6 bulan menjadi hanya berlaku 70 hari per 1 April tahun ini. Aturan tersebut juga mengatur transaksi kliring bilyet giro. BI memangkas besaran kliring bilyet giro tersebut, yakni maksimal hanya Rp500 juta dari saat ini tak terbatas.

Menurut Bramudija Hadinoto, Kepala Departemen Operasional Treasuri dan Pinjaman BI, aturan tersebut merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Pada aturan tersebut BI mempertegas perbedaan cek dan giro serta menegaskan bahwa aturan bilyet giro tak bisa dipindahtangankan.

Bramudija menambahkan, nilai kliring dibatasi lantaran bank sentral akan mengarahkan bilyet giro untuk transaksi bernilai kecil atau ritel. Untuk transaksi besar, BI akan mendorong penggunaan *credit transfer* karena lebih aman (*good fund*) serta lebih memberi kepastian kepada para pihak. Berdasarkan pengalaman Bramudija sebagai Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran BI, ada beberapa kejadian bilyet giro dengan nilai besar yang disalahgunakan.

BI mengeluarkan aturan tersebut untuk melindungi kepentingan pengguna dan penerima giro, baik itu bank, penerbit, maupun pemegang (penerima). Sementara itu, menurut Josua Pardede, Kepala Ekonom PermataBank, BI perlu berkoordinasi dengan OJK mengenai masalah tersebut agar menghasilkan regulasi yang sempurna, yang mampu mencegah *fraud* di industri. “Jika masih banyak terjadi atau masih ada lubang celah, karena itu, saya pikir, itu perlu diperketat,” tuturnya. ■

Ada Geliat Pertumbuhan Kredit

Kondisi ekonomi global yang relatif lebih baik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Penyaluran kredit perbankan sepanjang triwulan pertama tahun ini membaik.

Melihat kondisi ekonomi yang mulai membaik, pelaku industri perbankan mulai optimistis terhadap bisnis yang mereka jalankan. Hal itu terlihat dari kinerja penyaluran kredit yang makin membaik pada triwulan/kuartal pertama 2017.

Namun, berbeda dengan periode yang sama tahun lalu, beberapa bank besar justru agak kesulitan dalam menyalurkan kredit. Saat ini hampir semua bank mengalami pertumbuhan dalam penyaluran kredit. Bahkan, beberapa bank mencatatkan pertumbuhan *double digit*. Pertumbuhan ini diyakini akan bertahan sampai dengan akhir tahun nanti.

Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan, kredit perbankan tumbuh 9,26% pada triwulan pertama tahun ini. Pertumbuhan ini lebih tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,70%.

“Dibandingkan dengan tahun lalu, kredit sudah menggeliat pada awal tahun ini. Dibandingkan dengan tahun lalu, kredit baru menggeliat pada pertengahan tahun. Jadi, berbagai macam kegiatan usaha dan intermediasi sudah berjalan,” jelasnya kepada wartawan.

Ita Rulina, Deputy Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI), mengatakan, pertumbuhan kredit yang terjadi pada triwulan pertama tahun ini lebih didukung oleh sektor infrastruktur, konsumsi, dan jasa sosial. Menurutnya, membaiknya kondisi ekonomi dalam negeri juga berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan kredit perbankan tersebut.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, disebabkan oleh pendapatan domestik bruto (PDB) yang meningkat. Hal ini akibat mulai membaiknya harga komoditas dari dalam negeri sehingga ekspor turut membaik. Selain itu, belanja pemerintah membuat para pelaku usaha menjadi makin optimistis.

“Salah satu faktor membaiknya penyaluran kredit ialah pelonggaran *loan to value (LTV)*. Ini sudah empat kali keluar. Pertama dan kedua memang bertujuan mengerem. Ketika sudah dilonggarkan seperti saat ini memang terkesan menjadi terlalu longgar. Namun, ini semua dilakukan karena indikasi risiko sistemiknya sudah menurun, jadi kredit bisa tumbuh kembali,” jelas Ita.

Salah satu bank yang mencatatkan pertumbuhan kredit tinggi ialah Bank Mandiri. Pada triwulan pertama tahun ini



KUR BRI; 30% untuk sektor produktif

penyaluran kredit Bank Mandiri sudah mencapai Rp656,2 triliun, meningkat 14,2% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp574,7 triliun.

Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri, mengatakan, pertumbuhan kredit banknya ke sektor produktif sebesar Rp497,8 triliun atau naik 13%. Dari sektor produktif tersebut, kredit investasi meningkat sebesar 15% dan kredit modal kerja meningkat sebesar 11,9%.

Pesatnya pembangunan infrastruktur juga berdampak terhadap penyaluran kredit di sektor tersebut. Setidaknya, Bank Mandiri sudah menyalurkan kredit sebesar Rp202,8 triliun ke sektor infrastruktur atau mengalami peningkatan sebesar 28%. Pendistribusiannya ialah untuk pembiayaan jalan raya dan tol sebesar Rp19,5 triliun, transportasi sebesar Rp52,2 triliun, tenaga listrik Rp45,5 triliun, migas dan energi terbarukan sebesar Rp32,4 triliun, konstruksi sebesar Rp22,2 triliun, dan telematika sebesar Rp15,2 triliun.

“Melalui penguatan fungsi intermediasi ini, Bank Mandiri ingin mempertegas peranan sebagai agen pembangunan yang ingin berkontribusi maksimal dalam merealisasikan program-program strategis pemerintah,” ujar Kartika akhir April lalu.

Tak hanya itu, pembiayaan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Bank Mandiri juga mengalami peningkatan, yaitu 4,8% atau mencapai Rp78,2 triliun pada

Kredit Perbankan 2014 - 2017 (Rp Miliar)

Keterangan	2014	2015	▲(%)	2016	▲(%)	Maret 2016	Maret 2017	▲(%)
Kredit yang Diberikan	3.706.501	4.092.104	10,40	4.413.414	7,85	4.029.924	4.402.975	9,26
Kredit kepada Pihak Ketiga	3.674.308	4.057.904	10,44	4.377.195	7,87	4.000.448	4.369.967	9,24
- Rupiah	3.057.964	3.423.180	11,94	3.736.609	9,16	3.406.400	3.731.168	9,53
- Valuta Asing	616.345	634.724	2,98	640.585	0,92	594.049	638.798	7,53
Kredit kepada Bank Lain	32.192	34.200	6,24	36.220	5,91	29.476	33.008	11,98
- Rupiah	19.100	21.443	12,27	22.983	7,18	18.316	22.141	20,88
- Valuta Asing	13.092	12.757	-2,56	13.237	3,76	11.160	10.868	-2,62

Keterangan:

- ▲ : pertumbuhan (%)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah kembali oleh Biro Riset Infobank.

triwulan pertama tahun ini. Sementara itu, pembiayaan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat menjadi Rp38,3 triliun dengan penyaluran terhadap lebih dari 826.000 nasabah.

Sesuai dengan rencana ekspansi bisnis perusahaan, Bank Mandiri juga menggenjot sektor korporasi dan konsumen. Penyaluran kredit ke kedua sektor tersebut masing-masing sudah mencapai Rp87,2 triliun dan Rp234,7 triliun.

Masih menurut Kartika, ekspansi kredit korporasi yang dilakukan banknya didorong oleh keterlibatan perseroan di sejumlah proyek infrastruktur. Untuk sektor konsumen, kontributor atau penyumbang ekspansi kredit konsumen berasal dari kredit pemilikan rumah (KPR) yang mencapai Rp30,2 triliun dan kredit kendaraan bermotor (KKB) sebesar Rp22,6 triliun.

Bank lain yang juga ikut memberikan kontribusi dalam kenaikan kredit perbankan ialah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sampai dengan Maret tahun ini, BRI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp653,1 triliun atau meningkat 16,4% dari triwulan pertama tahun lalu. Porsi terbesar penyaluran kreditnya masih didominasi oleh sektor UMKM dengan porsi mencapai 72,1% dari total kredit atau senilai Rp471 triliun.

Kredit mikro masih memegang porsi terbesar dari seluruh segmen kredit BRI, yakni sebesar 33% atau senilai Rp216,1 triliun dari seluruh kredit yang disalurkan.

Suprajarto, Direktur Utama BRI, mengatakan, fokus perseroan masih pada KUR. Pada triwulan pertama tahun ini penyaluran KUR oleh BRI sudah mencapai Rp14,1 triliun, yaitu kepada lebih dari 763.000 debitur baru. "Tiga puluh persen di antaranya disalurkan ke sektor produktif. Targetnya, perseroan bisa mematok 40% penyaluran KUR ke sektor produktif sepanjang tahun ini," jelasnya kepada wartawan.

Tak mau ketinggalan, Bank Central Asia (BCA) juga turut mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit. Pada periode Januari-Maret tahun ini kredit yang sudah disalurkan BCA sebanyak Rp408,9 triliun, tumbuh 9,4% dari periode sebelumnya sebesar Rp373,8 triliun. Penyaluran terbesar masih sektor korporasi.

Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA, mengatakan, kredit korporasi BCA mencapai Rp155,6 triliun atau meningkat 17,9%. Sementara itu, kredit komersial dan UKM naik 1,7% menjadi Rp144,7 triliun. Di lain sisi, kredit konsumen tumbuh 9,4% menjadi Rp111,7 triliun, yang didukung oleh pertumbuhan di semua produk.

Kredit yang lainnya, yaitu KPR, bertambah menjadi Rp66,1 triliun atau naik 10,4%, sementara KKB menjadi Rp35,1 triliun atau meningkat 7,3%. Pada akhir triwulan pertama 2017 *outstanding* kartu kredit tercatat sebesar Rp10,5 triliun, tumbuh 10,7%.

NPL Terkendali

Penyaluran kredit perbankan yang lebih baik juga diimbangi dengan *non performing loan* (NPL) yang terkendali. Menurut data OJK, NPL pada Maret 2017 ialah 3,04%. Angka

tersebut masih lebih baik daripada bulan sebelumnya yang sebesar 3,16%.

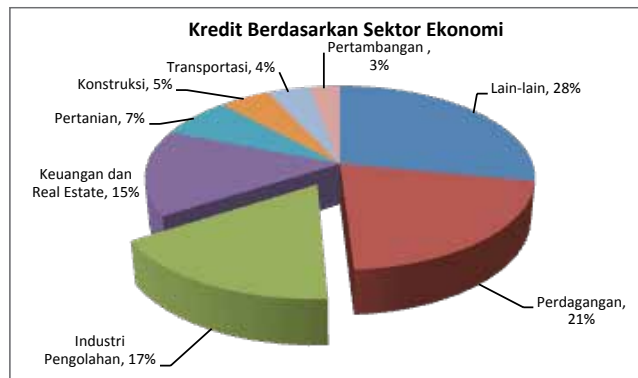
"Artinya ada sedikit perbaikan. Dan, saya kira dengan tren pertumbuhan kredit yang kita perkirakan tetap terus maju, maka saya kira NPL akan terus menurun secara bertahap," ucap Muliaman.

Masih menurut Muliaman, perbankan yang disiplin akan mampu menurunkan risiko

kredit. Untuk itu, dirinya akan terus memantau perkembangan kredit, terutama yang mengalami restrukturisasi.

Faktor lain juga masih solid, seperti rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio* atau CAR) yang sebesar 23%. Dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian perekonomian global bisa diantisipasi oleh perbankan dalam negeri.

Ita Rulina, Deputy Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI menambahkan, tren NPL memang mengalami penurunan sejak awal tahun ini sehingga risiko kredit masih terjaga dengan baik. "Dengan menurunnya NPL, permodalan bank mengalami penguatan. Kontribusi NPL tertinggi berasal dari bank di BUKU 2 dan yang membentuk CAR paling baik adalah bank di BUKU 3," tutupnya. ■



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah kembali oleh Biro Riset Infobank.

Bank Bakal Dibebani Pungutan Baru

Jika sebelumnya industri perbankan nasional mesti membayar premi kepada OJK dan program penjaminan simpanan di LPS, ke depan industri ini juga harus membayar premi program restrukturisasi. Meski bertujuan baik, pungutan premi ini masih jadi polemik.

Industri perbankan nasional akan dibebani pungutan baru, yakni premi program restrukturisasi perbankan yang dipungut oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini dilakukan sebagai penjabaran dan realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), khususnya ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Huruf C dan Ayat (2) UU PPKSK, bahwa salah satu sumber pendanaan program restrukturisasi perbankan berasal dari kontribusi industri perbankan.

Program restrukturisasi bertujuan melindungi industri perbankan dari risiko sistemik. Menurut *beleid* tersebut, penyelesaian bank bermasalah harus dari internal, bukan dari eksternal. Dengan begitu, tidak akan ada lagi *bail out* yang memakan dana masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti halnya kasus penutupan bank beberapa tahun lalu.

Beleid tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan program restrukturisasi berasal dari kontribusi pelaku industri. Dan, pendanaan itu diwujudkan dalam bentuk premi. Kontribusi tersebut merupakan bagian dari premi penjaminan atau UU LPS yang penetapannya dilakukan sebelum program restrukturisasi perbankan diselenggarakan. Besaran premi untuk pendanaan program restrukturisasi perbankan yang akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) ini akan ditetapkan pada April 2017 setelah PP tersebut dikeluarkan.

Hingga kini, memang belum dipastikan, apakah premi restrukturisasi ini bakal dikecualikan dari premi reguler atau tidak. Oleh sebab itu, LPS terus melakukan pengkajian terkait dengan hal tersebut. Saat ini industri perbankan dipungut premi reguler sebanyak dua kali dalam setahun, dan setiap



Bank-bank di Indonesia; terlindungi dari risiko sistemik

semester ditetapkan sebesar 0,1% sehingga dalam satu tahun atau dua semester sebesar 0,2%.

“Premi restrukturisasi perbankan itu tambahan dari premi *existing* LPS yang 0,2%. Pertanyaannya, *rate* berapa dan apakah ada *grace period*-nya (jeda waktu) berapa tahun setelah ditetapkan, itu masih didiskusikan,” ujar Fauzi Ichsan, Kepala Eksekutif LPS, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Fauzi mengungkapkan, dalam menentukan besaran iuran premi baru tersebut, LPS dan pemerintah akan berdiskusi dengan pelaku industri perbankan. Melalui diskusi tersebut, harapannya ada banyak masukan, baik dari LPS, pemerintah, maupun industri, terkait dengan besaran iuran premi restrukturisasi. Dengan demikian, regulator dan pemerintah bisa menetapkan besaran iuran premi PRP yang tentunya diharapkan tidak membebani pelaku industri perbankan.

Kendati bertujuan baik, pungutan premi ini masih jadi polemik. Distribusi beban premi yang akan dikenakan kepada

industri pun masih belum jelas, meski beberapa opsi sudah disiapkan untuk mengatasi masalah ini. “Sekarang tentunya kami butuh masukan dari *stakeholders*, tentunya dari perbankan. Tentu akan keberatan kalau terlalu besar, tapi yang menentukan pemerintah. Maka dari itu, kami butuh masukan dari *stakeholders*,” papar Fauzi.

Metode penghitungan yang diusulkan LPS terkait dengan premi restrukturisasi ini masih menggunakan dua opsi, yaitu *flat rate* dan *multiple bucket premium*. Dalam hal ini, digunakan beberapa parameter, seperti kelompok bank berdasarkan bank umum kegiatan usaha (BUKU) 1 sampai dengan BUKU 4, kelompok risiko bank, atau kombinasi keduanya.

Simulasi besaran premi yang sudah dilakukan LPS ialah dengan menetapkan pertama kali target *fund* yang akan dihimpun selama satu kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, di Jerman 0,05% x PDB (15 tahun), Swedia 2,5% x PDB (15 tahun), Jepang 0,038% x simpanan (20 tahun), dan Uni Eropa 1,05% x total simpanan yang dijamin (8 tahun). Sementara, IMF 2%-4% x PDB (*nett*).

Harus diakui bahwa program restrukturisasi memang bukan dimaksudkan untuk menyelamatkan bank secara individu, melainkan lebih ke seluruh industri perbankan demi menjaga “*value*” industri perbankan. Mengenai masalah premi ini, para pelaku industri memang tak bisa menolak karena sesuai dengan perintah UU. Namun, ada harapan bahwa besaran premi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank yang kinerjanya berbeda-beda. Bank yang berkinerja baik diharapkan memperoleh insentif dari program ini.

Fauzi Ichsan mengaku, sejauh ini pihaknya dan Kementerian Keuangan masih membahas besaran premi untuk pendanaan program restrukturisasi tersebut. Karena, berdasarkan UU, hanya Kementerian Keuangan yang berhak menetapkan besaran premi.

Jangan Membebani Industri!

Rencana penerapan premi restrukturisasi mendapat perhatian dari para pelaku industri perbankan, termasuk Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI, berharap, besaran premi yang dikenakan pada industri perbankan nasional tidak membebani karena industri ini masih dalam masa konsolidasi. April lalu, misalnya, pertumbuhan kredit perbankan baru 9,5% secara tahunan. Padahal, pertumbuhan kredit ditargetkan sebesar 10%-12%.

“Persiapan sekarang pun kalau terkait memungut biaya untuk program restrukturisasi perbankan ataupun yang lain

untuk kami (harapkan) tidak terlalu memberatkan bank karena mereka sedang dalam taraf pemulihan,” katanya kepada wartawan.

Di lain sisi, Agus justru mendorong ketentuan agar bank yang berdampak sistemik membuat rencana aksi (*recovery plan*). Sebelumnya, OJK memang telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 15 Tahun 2017 mengenai rencana aksi bagi bank berdampak sistemik. Aturan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 19 UU PPKSK, yang meminta OJK membuat detail terkait dengan langkah penyehatan bank.

Menurut beberapa pelaku industri, usulan besaran premi sebesar 2%-3% dari PDB dinilai akan membebani industri perbankan. Tambahan premi ini akan meningkatkan biaya operasional atau *overhead cost* perbankan. Dengan PDB 2016 senilai Rp12.406 triliun, premi 2%-3% berkisar Rp248,12 triliun-Rp372,18

triliun. Jumlah tersebut tentunya tak sedikit.

Jahja Setiaatmadja, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk, mengusulkan agar besaran premi yang akan dikenakan kepada industri disesuaikan dengan kondisi likuiditas bank.

Kondisi tersebut dapat diukur dari rasio pinjaman terhadap pendanaan (*loan to funding ratio* atau *LFR*). Jika *LFR* rendah, premi restrukturisasi yang ditanggung bank pun sebaiknya makin rendah. Menurut Jahja, premi yang besar tak adil bagi industri karena akan membebani perbankan. “Kalau *LFR* rendah, berarti bank ‘*kan* makin likuid. Kalau semakin likuid, risiko kesulitan dana ‘*kan* semakin sedikit,” tutur Jahja.

Iman Nugroho Soeko, Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), juga berharap, premi restrukturisasi ditetapkan serendah mungkin. Iman mengaku, industri perbankan hingga kini belum diajak untuk berdialog khusus terkait dengan besaran pungutan premi tersebut. “Sepertinya tidak ada dialog dengan industri. Namun, (besaran premi) langsung ditetapkan oleh regulator,” kata Iman.

Sementara itu, Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, mengatakan, rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (*CAR*) perbankan masih cukup tinggi, yaitu di atas 20%. “Saat ini perbankan di Indonesia ada empat mekanisme pertahanan terhadap krisis (sehingga kondisinya cukup kuat),” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Taswin Zakaria, Direktur Utama PT Maybank Indonesia. Menurutnya, konsep premi restrukturisasi tersebut belum mendesak karena risiko sistemik perbankan belum meningkat. Pungutan OJK dan LPS, lanjutnya, sudah cukup memadai untuk menangani risiko industri keuangan saat ini. “Kecuali, menurut LPS saat ini ada peningkatan risiko industri,” tutupnya. ■



Fauzi Ichsan; akan berdiskusi

Harus diakui bahwa program restrukturisasi memang bukan dimaksudkan untuk menyelamatkan bank secara individu, melainkan lebih ke seluruh industri perbankan demi menjaga “value” industri perbankan.

Kerja Sama IKPIA Perbanas dengan KFB

Kerja sama Indonesia dengan Korea sudah merambah ke berbagai bidang. Salah satunya bidang perbankan, melalui kerja sama antara IKPIA Perbanas dan Korea Federation of Banks (KFB). Langkah ini diharapkan mampu membangun SDM perbankan yang mampu bersaing di kancah Asia.



Bila ingin memajukan sektor perbankan, faktor sumber daya manusia (SDM) tak bisa diabaikan. Pada era global seperti sekarang ini, mempersiapkan SDM yang siap pakai serta mumpuni adalah keharusan. Namun, hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Perlu komitmen yang kuat dari para pihak terkait untuk terus membina SDM, dalam hal ini perbankan, agar bisa tetap bersaing, baik di kancah nasional maupun internasional.

Nah, terkait dengan itu, pada 11 April 2017 Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (IKPIA) Perbanas melakukan penandatanganan kerja sama dengan Korea Federation of Banks (KFB). Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di Auditorium Unit III Kampus IKPIA Perbanas, Kuningan, Jakarta, yang dihadiri oleh Yung-Ku Ha (*CEO & Chairman of KFB*), anggota delegasi KFB, karyawan, staf pengajar, serta mahasiswa IKPIA Perbanas.

Kerja sama itu diharapkan dapat mendorong IKPIA Perbanas mewujudkan visi IKPIA Perbanas 2019, yakni *"To be the Most Reputable Asian Banking Education*

Institute that aims to be Top 5 Asian Banker's Center of Excellence". Guna mewujudkan visi tersebut, IKPIA Perbanas mengoptimalkan seluruh sumber daya dan *networking* yang dimilikinya. Termasuk dukungan dari berbagai instansi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kerja sama IKPIA Perbanas dengan KFB diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan di sektor keuangan dan perbankan. Tujuan kerja sama, menurut Wiwiek Prihandini, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Keuangan Perbanas, ialah untuk meningkatkan kualitas SDM sektor keuangan dan perbankan di Indonesia, khususnya bagi tenaga pengajar dan mahasiswa IKPIA Perbanas. IKPIA Perbanas berkomitmen lulusannya bisa terserap dan langsung siap pakai di industri perbankan. "Kami ingin terus meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur supaya tetap berada di lini depan persaingan perguruan tinggi, baik di level nasional maupun internasional," ujarnya.

Kerja sama antara Indonesia dan Korea di sektor perbankan memang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa investor asal Korea bahkan mengakuisisi bank-bank lokal. Sebut saja Bank Shinhan yang pada 2016 mengakuisisi Bank Metro Express dan Centratama National Bank (CNB). Setelah proses akuisisi, Bank Shinhan beroperasi dengan nama Shinhan Bank Indonesia (SBI).

Sebelumnya, bank asal Korea juga sudah ada yang beroperasi di Indonesia, yaitu Bank Korea Commercial Surya (BKCS). BKCS mulai beroperasi di Indonesia pada 1995. Selanjutnya, pada 2000 BKCS merger dengan Hanil Tamara Bank dan berubah nama menjadi Bank Hanvit Indonesia. Pada 2002 Bank Hanvit Indonesia berganti nama menjadi Bank Woori Indonesia. Bank Woori Indonesia yang dimiliki investor asal Korea pada 2014 merger dengan Bank Saudara dan berubah nama menjadi Bank Woori Saudara. ■



INSTITUT KEUANGAN PERBANKAN
DAN INFORMATIKA ASIA



PERBANAS

PERBANAS INSTITUTE

PERINGKAT 1

Kalangan Institut diberikan oleh
RISTEKDIKTI

Best School of Management

by MIX Marketing Communications
Magazine & Business Digest

AKREDITASI
A



PERIODE
PENDAFTARAN

NOVEMBER 2016 - AGUSTUS 2017

PROGRAM STUDI

STRATA SATU (S-1) AKUNTANSI
STRATA SATU (S-1) MANAJEMEN
STRATA SATU (S-1) EKONOMI SYARIAH
D-3 AKUNTANSI PERPAJAKAN
D-3 KEUANGAN DAN PERBANKAN

STRATA SATU (S-1) TEKNIK INFORMATIKA
STRATA SATU (S-1) SISTEM INFORMASI
S1 LANJUTAN / EKSTENSI
PASCASARJANA
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN (PPAk)

DI DUKUNG OLEH



BEKERJASAMA DENGAN



SYARAT PENDAFTARAN

1. Fotokopi Ijazah/Surat Keterangan Lulus yang sudah dilegalisasi
2. Fotokopi nilai rapor semester akhir kelas XI dan semester awal kelas XII yang sudah di legalisasi bagi calon mahasiswa reguler
3. Fotokopi Transkrip nilai akademik yang sudah di legalisasi dari Perguruan Tinggi asal bagi calon mahasiswa lanjutan dan Pascasarjana
4. Foto 4x6 berwarna 1 lembar
5. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
6. Printout : Terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Dikti (<http://forlap.dikti.go.id>) bagi calon mahasiswa lanjutan dan Pascasarjana

Follow Our Official Account in
Social Media Apps For News Update:

Kampus
Jl. Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi
Telp (021) 5252533, 5222501-4
Fax (021) 5228460, 5704376
Jakarta

Kampus
Jl. Cut Meutia Raya No:2
Telp (021) 8224383
Fax (021) 8224432
Bekasi



0888-6109-108



Perbanas Institute



PMBPerbanasInstitute
@rfo97701



@perbanas

www.perbanas.id